

STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Mario Laurensius Reynhard Jeranuru

NPP. 32.0662

Asdaf Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 32.0662@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Samsul Arifin, S.pd, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): People with disabilities are a vulnerable group who often experience discrimination, limited access, and minimal participation in social development. In Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, the empowerment strategy for people with disabilities by the Social Service is considered not to be running optimally. The programs implemented tend to be charitable in nature and have not touched on aspects of skills training or education that support independence. This shows a gap between the needs of the disabled community and the empowerment strategy implemented. **Purpose:** This study aims to determine the strategy of the Social Service in empowering people with disabilities in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. **Method:** The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** shows that the Social Service has several strategies in empowering people with disabilities, such as skills training and social assistance, but its implementation is still uneven and inconsistent. The main obstacles faced include budget limitations, low number of professional assistance personnel, and minimal disability-friendly education and training facilities. In addition, the participation of people with disabilities in policy planning is still very limited. **Conclusion:** empowerment of persons with disabilities in Manggarai Regency requires a more systematic, inclusive, and sustainable approach. Synergy is needed between the government, society, and educational institutions to create programs that are not only temporary assistance, but are also able to improve the capacity and independence of persons with disabilities as a whole.

Keywords: strategy, empowering, people with disabilities

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang seringkali mengalami diskriminasi, keterbatasan akses, dan minimnya partisipasi dalam pembangunan sosial. Di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, strategi pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dinilai belum berjalan optimal. Program-program yang dijalankan cenderung bersifat karitatif dan belum menyentuh aspek pelatihan keterampilan atau pendidikan yang mendukung kemandirian. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat disabilitas dan strategi pemberdayaan yang diterapkan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah memiliki beberapa strategi dalam memberdayakan penyandang disabilitas, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan sosial, namun implementasinya masih belum merata dan konsisten. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya jumlah tenaga pendamping profesional, serta minimnya fasilitas pendidikan dan pelatihan yang ramah disabilitas. Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas dalam perencanaan kebijakan masih sangat terbatas. **Kesimpulan:** pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis, inklusif, dan berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program yang tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Kata Kunci: Strategi, Memberdayakan, Penyandang Disabilitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan. Salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus adalah penyandang disabilitas, yaitu individu yang mengalami gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang menghambat partisipasi penuh mereka dalam kehidupan bermasyarakat (Dunan et al., 2025). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Penyandang disabilitas kerap menghadapi stigma negatif dan diskriminasi di tengah masyarakat (Mulyono et al., 2023). Mereka sering dianggap tidak mampu dan tidak produktif, yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan pelatihan kerja. Padahal, prinsip non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas telah dijamin dalam berbagai regulasi, termasuk Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang mengalami gangguan mental, kelainan, atau kehilangan fungsi tubuh tertentu (Wahyudi et al., 2023). Meskipun memiliki keterbatasan, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak mereka dalam memperoleh kehidupan yang layak serta hak untuk mempertahankan hidup. Mereka bukanlah kelompok minoritas yang pantas didiskriminasi, melainkan harus diperlakukan setara dengan warga

lainnya, karena secara hukum setiap individu memiliki kedudukan yang sama (Hastuti et al., 2022). Dalam konteks pemberdayaan, penting untuk memahami bahwa penyandang disabilitas bukanlah objek yang perlu dikasihani, melainkan individu yang memiliki potensi dan hak yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat (Bunga et al., 2022).

Di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah penyandang disabilitas cukup signifikan. Berdasarkan data Kabupaten Manggarai Dalam Angka 2021, terdapat 4.227 jiwa penyandang disabilitas dari total 334.464 penduduk, atau sekitar 1,3% dari jumlah keseluruhan. Jenis disabilitas yang tercatat meliputi tuna netra, tuna rungu wicara, tuna grahita, tuna daksa, dan disabilitas ganda. Kecamatan dengan jumlah tertinggi adalah Ruteng (644 jiwa), Satar Mese (608 jiwa), dan Wae Rii (441 jiwa).

Sayangnya, upaya pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai masih banyak menghadapi kendala. Bantuan yang diberikan umumnya bersifat karitatif seperti sembako dan uang tunai, tanpa disertai program pelatihan atau pendidikan yang bersifat memberdayakan. Akses pendidikan pun sangat terbatas, hanya terdapat satu Sekolah Luar Biasa (SLB) di kabupaten ini yang khusus melayani tuna netra. Sementara jenis disabilitas lainnya tidak memiliki institusi pendidikan khusus yang memadai.

Masalah lainnya mencakup minimnya pelatihan keterampilan, kurangnya tenaga pendamping profesional, serta terbatasnya pelibatan penyandang disabilitas dalam perumusan kebijakan. Akibatnya, banyak program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan riil penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang bersifat holistik dan inklusif, dengan memperhatikan potensi individu penyandang disabilitas serta melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembangunan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun telah banyak kebijakan nasional dan regional yang mengatur tentang perlindungan serta pemberdayaan penyandang disabilitas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum optimal, terutama di daerah seperti Kabupaten Manggarai. Dalam konteks ini, kesenjangan antara kebijakan ideal dengan praktik aktual menjadi dasar utama yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 secara eksplisit menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup mandiri, memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara penuh dan setara. Namun, di Kabupaten Manggarai, pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial cenderung masih bersifat karitatif, terbatas pada bantuan sembako dan uang tunai. Bantuan semacam ini hanya bersifat sementara dan tidak mampu mengangkat penyandang disabilitas menjadi individu yang mandiri secara ekonomi maupun sosial. Padahal, esensi pemberdayaan seharusnya terletak pada pengembangan potensi individu melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan secara berkelanjutan. Kesenjangan lainnya dapat dilihat pada keterbatasan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Hanya terdapat satu Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Manggarai yang melayani penyandang tuna netra, sedangkan anak-anak dengan jenis disabilitas lain tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Hal ini memperparah ketidaksetaraan kesempatan belajar dan mempersulit upaya pemberdayaan dalam jangka panjang. Selain itu, program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah belum merata dan belum menjangkau semua jenis disabilitas. Kelompok rentan dan terpinggirkan bahkan sering kali tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan formal. Beberapa penyandang disabilitas yang pernah mengikuti pelatihan pun mengaku tidak memahami materi pelatihan karena tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ini menunjukkan kurangnya pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam perencanaan program, di mana penyandang disabilitas lebih sering diwakili oleh

keluarga, bukan dilibatkan secara langsung. Keterbatasan tenaga pendamping profesional dan fasilitas ramah disabilitas juga menjadi kendala penting yang memperlebar kesenjangan ini. Idealnya, pemberdayaan dilakukan oleh tenaga ahli dengan pemahaman yang tepat mengenai jenis dan kebutuhan disabilitas tertentu, namun dalam praktiknya hal ini belum terpenuhi di Kabupaten Manggarai. Dari sisi akademik, studi terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini umumnya dilakukan di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Pekanbaru, dan Binjai. Fokus dari studi-studi tersebut lebih menekankan pada aspek peran Dinas Sosial atau pembinaan kepercayaan diri penyandang disabilitas tertentu, seperti daksa. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji strategi Dinas Sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas secara menyeluruh di Kabupaten Manggarai dengan menggunakan pendekatan teori strategi dari Fred R. David. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi aktual pemberdayaan penyandang disabilitas, tetapi juga menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial setempat, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Melalui pendekatan strategi yang sistematis dan berbasis teori, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan dan praktik pemberdayaan penyandang disabilitas di daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Penelitian Rosy Maria Ulfa, Tontowi Jauhari, dan Siti Bahiroh (Ulfa et al., 2020) berjudul Pola Pembinaan Kepercayaan Diri Penyandang Disabilitas Daksa Bina, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Pembinaan Kepercayaan Diri Penyandang Disabilitas Daksa. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan yang relevan sehingga temuan penelitian ini yang diperlukan untuk mengetahui sejauhmana pola dari pembinaan kepercayaan diri terhadap penyandang disabilitas daksa. Dengan hasil yang didapat dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diterapkan di BRTPD bersifat kekeluargaan dan demokratis, tanpa kekerasan atau paksaan. Warga binaan diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan mengikuti kegiatan sesuai minat, dengan tetap adanya bimbingan dan pengawasan dari pihak lembaga. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan diri penyandang disabilitas daksa karena mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengembangan diri.

Penelitian yang dilakukan oleh Denny Amansyah, Ilham Yuri Nanda, Imam Syahid (Amansyah et al., 2023) yang berjudul Peranan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memberdayakan penyandang disabilitas mencakup empat dimensi, yaitu peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Dalam peran fasilitatif, Dinas Sosial telah berupaya menyediakan bantuan sosial dan alat bantu seperti kaki palsu, kursi roda, dan tongkat. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala serius, terutama dalam hal pendataan. Banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata secara resmi karena tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), atau berpindah tempat tinggal secara berkala, sehingga menyulitkan proses administrasi dan distribusi bantuan.

Penelitian Suhailah Hayati (Hayati, 2019) yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai, Penelitian ini enelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara alami, dengan menekankan pada pemahaman proses dan makna di balik peristiwa yang diteliti. Teknik

pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Binjai. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Edi Suharto dalam Labolo (2014) dimana konsep pemberdayaan dalam penelitian ini mencakup pendekatan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemandirian individu dan kelompok yang mengalami kerentanan sosial, dalam hal ini penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Binjai sudah berjalan, namun belum optimal. Program pemberdayaan yang dilaksanakan berupa pelatihan keterampilan, namun masih terbatas dari segi frekuensi, jenis pelatihan, serta jangkauan peserta. Sebagian besar pelatihan hanya dilakukan setahun sekali, dan belum semua penyandang disabilitas dapat mengaksesnya. Selain itu, terdapat kendala dalam pendataan dan minimnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas ke layanan publik dan pelatihan kerja. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Dinas Sosial telah berupaya melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Binjai, upaya tersebut perlu ditingkatkan baik dari sisi cakupan program, kualitas pelatihan, keterlibatan pihak luar, hingga akses yang setara terhadap seluruh fasilitas sosial. Pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas dan partisipasi aktif menjadi kunci untuk menciptakan kemandirian sosial bagi penyandang disabilitas.

Penelitian oleh Leander Alvian Dwivan (Alvian Dwivan, 2021) yang berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kota Magelang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak terkait seperti pegawai Dinas Sosial Kota Magelang dan pendamping penyandang disabilitas, sementara observasi dilakukan untuk memahami langsung kondisi lapangan, terutama dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan layanan publik yang berkaitan dengan disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Magelang telah menjalankan keempat peran tersebut secara cukup baik, meskipun belum menyeluruh. Dalam peran fasilitatif, Dinas Sosial menyediakan bantuan seperti alat bantu, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi kerja sama dengan lembaga lain. Dalam peran edukatif, telah dilakukan upaya peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi penyandang disabilitas, namun jangkauan dan keberagamannya masih terbatas pada jenis disabilitas tertentu. Peran representasional terlihat dalam usaha Dinas Sosial menjalin kemitraan dengan organisasi penyandang disabilitas dan memanfaatkan media sebagai sarana promosi. Sedangkan dalam peran teknis, Dinas Sosial telah melakukan pendataan serta pelaporan secara berkala untuk mendukung program-program yang dijalankan. Meskipun upaya pemberdayaan telah dilakukan, penelitian ini menyoroti bahwa masih terdapat kesenjangan dalam distribusi edukasi dan pelatihan, serta belum optimalnya perhatian terhadap seluruh jenis disabilitas. Oleh karena itu, disarankan agar ke depannya Dinas Sosial meningkatkan keterlibatan semua pihak terkait, memperluas akses edukasi bagi semua jenis disabilitas, serta menanamkan nilai-nilai inklusivitas dan kepekaan sosial kepada aparatur pelaksana layanan publik agar penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan secara maksimal dan tanpa diskriminasi.

Penelitian Inriani Afriah (INDRIANI, 2023) yang berjudul Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti menggambarkan secara mendalam bagaimana kebijakan, program, dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi strategi pemberdayaan penyandang disabilitas. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan informan utama berasal dari

Dinas Tenaga Kerja serta penyandang disabilitas sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru masih belum optimal. Dinas telah merancang pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai wadah pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, namun hingga saat penelitian dilakukan, unit ini belum terealisasi. Selain itu, Dinas telah menyelenggarakan program pelatihan keterampilan seperti menjahit dan memberikan bantuan modal usaha sesuai jenis usaha yang dimiliki penyandang disabilitas. Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Sosial untuk memperluas jangkauan bantuan dan pelatihan.

Meskipun terdapat berbagai upaya, masih ditemukan banyak hambatan, seperti rendahnya partisipasi perusahaan dalam menyerap tenaga kerja disabilitas, tidak terpenuhinya kuota minimum 1–2% penyandang disabilitas yang wajib dipekerjakan oleh perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016, serta keterbatasan jumlah penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan dan berhasil memperoleh pekerjaan. Data dari Dinas Tenaga Kerja menunjukkan bahwa dari 295 penyandang disabilitas yang dikategorikan mampu bekerja, hanya 36 orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan hingga tahun 2022.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dimaksudkan untuk menganalisis strategi Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Persamaan antara kelima penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk mengetahui sejauhmana pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten manggarai terkhususnya para penyandang disabilitas. Selain itu, teknis analisis dan pendekatan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu model penelitian, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan serta teknik dalam mengumpulkan data juga memiliki kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta penulis juga memiliki kesamaan lain dengan penelitian terdahulu yaitu mengkaji secara mendalam mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah teori yang digunakan, dimana pada dasarnya teori yang seringkali di pakai oleh penulis lainnya yakni teori pemberdayaan dari mardikanto dan juga edi suharto yang lebih memfokuskan kepada pembinaan kelembagaan sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori strategi oleh David Fred R dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan strategi dinas sosial secara operasional dalam memberdayakan penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai.

1.5. Tujuan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menanggulangi kendala yang muncul dalam menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu dengan melihat peristiwa, menganalisis peristiwa yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode penelitian kualitatif. Hal bertujuan untuk memahami dengan baik mengenai metode penelitian yang tepat dengan langkah-langkah yang tepat dalam proses penelitian berlangsung .

Metode penelitian yang digunakan merupakan salah satu aspek yang krusial dimana memiliki dampak yang signifikan dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah penelitian, terutama dalam hal pengumpulan data. Karena, data yang diperoleh dalam suatu penelitian adalah representasi dari objek yang diteliti, untuk itu penelitian dengan metode yang tepat akan menjadi faktor penentu terhadap kualitas data yang diperoleh (Nurdin & Hartati, 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi dari Fred R. David (2017) sebagai kerangka teoritis utama. Teori ini terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi mencakup penetapan visi dan misi, analisis peluang dan ancaman eksternal, serta identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Implementasi strategi berfokus pada bagaimana strategi tersebut dijalankan, termasuk alokasi sumber daya, kebijakan operasional, dan penggunaan alat bantu. Sementara itu, evaluasi strategi melibatkan monitoring, penilaian berkala, dan tindakan korektif jika strategi yang dijalankan belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Penulis melaksanakan penelitian kualitatif dengan didasarkan pada pendapat Simangunsong (2017) dalam bukunya yang berjudul metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mempunyai bentuk desain yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk penelitian kualitatif yang mempunyai sifat emergent yaitu fenomena-fenomena muncul tiba-tiba dengan prinsip alami. Simangunsong (2017) juga menjelaskan bahwa data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang terdapat dalam transkrip.

Menurut Sugiyono (2022) Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat post-positivisme dan digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alamiah, berbeda dengan eksperimen yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data adalah triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dan generalisasi.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Basrowi, 2008). penulis menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan informan, yaitu individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan, keterlibatan, atau pengalaman langsung dengan proses pemberdayaan. Informan terdiri atas pejabat struktural di Dinas Sosial (seperti Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi), tenaga pendidik atau pembina penyandang disabilitas, penyandang disabilitas itu sendiri, serta orang tua dari penyandang disabilitas. Total informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah delapan orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Dinas Sosial Dalam memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi dinas sosial dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai, dalam hal ini penelitian dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai beserta penyandang disabilitas dan orang tuadari penyandang disabilitas itu sendiri. Penelitian Strategi Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan berdasarkan teori strategi menurut Fred R. David (2016 : 6-7) berupa

tiga unsur yaitu perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi sebagai berikut:

1. Perumusan Strategi

Berdasarkan pendapat Fred R. David (2016:6), proses penyusunan strategi melibatkan beberapa tahapan penting, yakni perumusan visi dan misi, pengenalan terhadap peluang serta ancaman yang datang dari lingkungan eksternal organisasi, pemahaman atas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki secara internal, penetapan sasaran jangka panjang, perumusan berbagai alternatif strategi, hingga penentuan strategi yang paling tepat guna mencapai sasaran tersebut.

Penulis menggunakan sub tema perumusan strategi untuk mengetahui apa saja indikator yang menyusun dan membentuk rumusan strategi tersebut dan mengetahui dasar pemikiran dalam membuat strategi Dinas Sosial dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam memberdayakan penyandang disabilitas adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang berdaya bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat hidup mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Pemberdayaan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pokok penyandang disabilitas, termasuk menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan menyediakan sarana umum ramah disabilitas, serta pendampingan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.

a. Visi dan Misi

Visi dan misi menjadi salah satu sub-sub tema dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai, yang diharapkan dapat menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas, dalam proses wawancara informan, yang dipilih adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka, peneliti menyimpulkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam memberdayakan penyandang disabilitas adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang berdaya bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat hidup mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Pemberdayaan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pokok penyandang disabilitas, termasuk menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, mewujudkan pembangunan yang inklusif dengan menyediakan sarana umum ramah disabilitas, serta pendampingan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.

b. Peluang dan Ancaman Organisasi

Peluang dan ancaman organisasi menjadi salah satu sub-sub tema dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai, yang diharapkan dapat menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas, Dalam proses wawancara informan, yang dipilih adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai memiliki peluang besar berkat dukungan hukum melalui UU No. 8 Tahun 2016 dan komitmen pemerintah daerah untuk membangun masyarakat inklusif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti belum lengkapnya data

penyandang disabilitas, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, serta masih kuatnya stigma negatif dari masyarakat. Meski demikian, kerja sama antara Dinas Sosial dan lembaga swasta menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan dan mendorong pemberdayaan yang lebih merata dan efektif. Dalam prose wawancara informan, yang dipih adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabiitas

c. Kekuatan dan kelemahan Internal

Kekuatan dan kelemahan internal menjadi salah satu sub-sub tema dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat penyandang dsiabiitas di Kabupaten Manggarai, yang diharapkan dapat menciptakan pemberdayaan bagi massyarakat penyandang disabilitas. Dalam prose wawancara informan, yang dipih adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabiitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap indikator ini dapat peneliti simpulkan bahwa Pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai menghadapi tantangan besar meskipun memiliki berbagai aset pendukung seperti anggaran, SDM, program-program, dan kerja sama lintas instansi serta swasta. Namun, keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga kerja profesional yang paham kebutuhan disabilitas menjadi hambatan utama. Kolaborasi dengan instansi lain berpotensi menguatkan program pemberdayaan, tetapi sering terkendala ketidaksinkronan kebijakan dan pelaksanaannya. Selain itu, kurangnya monitoring terhadap intervensi yang diberikan menyebabkan bantuan tidak terkontrol dan tidak efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan yang berkelanjutan.

2. Penerapan Strategi

Pelaksanaan strategi bertujuan untuk menetapkan target tahunan, merumuskan kebijakan, memberikan dorongan semangat, serta mendistribusikan sumber daya secara tepat, agar strategi yang telah disusun dapat dijalankan secara efektif. Proses ini mencakup pembentukan budaya organisasi yang mendukung strategi, penyusunan struktur organisasi yang efisien, penyesuaian aktivitas pemasaran, penyusunan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta penghubungan sistem kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Strategi yang hanya berhenti pada tahap perumusan tanpa diimplementasikan dengan baik tidak akan membawa manfaat nyata.

a. Alokasi Sumber Daya

Alokasi sumber daya menjadi salah satu sub-sub tema dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat penyandang dsiabiitas di Kabupaten Manggarai, yang diharapkan dapat menciptakan pemberdayaan bagi massyarakat penyandang disabilitas, dalam proses wawancara informan, yang dipilih adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabiitas, Tenaga Pendidik dan Pembina Penyandang Disabilitas, Orang Tua Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait mengenai indikator alokasi sumber daya dalam penelitian ini makan dapat peneliti simpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah mengalokasikan berbagai sumber daya secara cukup baik untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas, mulai dari bantuan finansial, beasiswa, pelatihan keterampilan, penyediaan infrastruktur ramah disabilitas, hingga regulasi ketenagakerjaan yang inklusif. Kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi

masyarakat juga menjadi kekuatan dalam menciptakan lingkungan inklusif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam distribusi bantuan yang belum merata, keterbatasan fasilitas yang tersedia, dan lemahnya pengawasan terhadap program pembinaan yang telah dijalankan. Kurangnya evaluasi lapangan menyebabkan program yang sudah dilaksanakan tidak sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan.

b. Kebijakan Memotivasi

Kebijakan memotivasi menjadi salah satu sub-sub tema dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai, yang diharapkan dapat menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas, dalam proses wawancara informan, yang dipilih adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas, dan Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung penyandang disabilitas, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga sosial dan psikologis. Layanan konseling, komunitas inklusif, dan peningkatan fasilitas publik seperti trotoar khusus serta transportasi umum yang ramah disabilitas menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian. Program pelatihan keterampilan dan dukungan wirausaha memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkembang sesuai minat dan bakat mereka. Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan inklusif yang melibatkan sektor swasta memperkuat akses terhadap dunia kerja. Semua ini bertujuan agar penyandang disabilitas merasa dihargai, percaya diri, dan mampu menjalani kehidupan secara mandiri.

c. Penggunaan Teknologi dan Alat bantu

Penggunaan teknologi dan alat bantu menjadi salah satu sub-sub tema dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai, yang diharapkan dapat menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas. dalam proses wawancara informan, yang dipilih adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas, Tenaga Pendidik dan Pembina Penyandang Disabilitas, Orang Tua Penyandang Disabilitas, dan Penyandang Disabilitas

Dari penjelasan mengenai indikator diatas sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat peneliti simpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas, seperti penggunaan Google Form untuk pendataan, pelatihan berbasis digital, penggunaan media sosial untuk mengurangi stigma, serta teknologi rehabilitasi dalam proses terapi. Inisiatif ini membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperluas akses terhadap informasi dan pelatihan keterampilan. Namun, penerapan teknologi ini belum sepenuhnya menjangkau wilayah pelosok yang terkendala jaringan, listrik, dan kurangnya perangkat digital. Selain itu, beberapa alat bantu yang rusak membutuhkan pengadaan ulang agar dukungan teknologi tetap berjalan maksimal dan merata bagi seluruh penyandang disabilitas di Manggarai.

3. Penilaian Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahapan final dalam manajemen strategi. Fungsi pokok agar manajer dapat mengetahui informasi tentang keberhasilan strategi yang telah dilaksanakan.

Menurut David (2017) perumusan strategi berkaitan dengan Monitoring faktor eksternal dan internal dari strategi yang dilaksanakan, Mengukur kinerja organisasi, dan Mengambil tindakan korektif.

a. Monitoring dan Evaluasi Program Berkala

Monitoring dan evaluasi program berkala menjadi salah satu sub-sub tema dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai, yang diharapkan dapat menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas, dalam prose wawancara informan, yang dipih adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas

Berdasarkan penelitian terhadap indikator monitoring dan evaluasi program berkala dalam penelitian ini dapat peneliti simpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan penyandang disabilitas secara sistematis, baik secara internal maupun eksternal. Namun, efektivitas dari kegiatan ini masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Meskipun monitoring dilakukan secara rutin, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan menyebabkan bantuan yang diberikan, seperti program ternak babi, tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini mencerminkan bahwa program yang dijalankan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, optimalisasi kerja sama lintas sektor, serta pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi ekonomi para penerima manfaat agar tujuan program benar-benar tercapai

b. Tindakan Korektif

Tindakan korektif menjadi salah satu sub-sub tema dalam menentukan strategi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai, yang diharapkan dapat menciptakan pemberdayaan bagi masyarakat penyandang disabilitas, dalam prose wawancara informan, yang dipih adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas

Berdasarkan indikator tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Program pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai tindakan korektif yang dilakukan, seperti peningkatan kapasitas SDM, perbaikan kurikulum pelatihan, serta pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam proses perencanaan. Meskipun demikian, efektivitas program masih perlu ditingkatkan karena belum seluruh penyandang disabilitas merasakan manfaatnya secara menyeluruh. Selain itu, dibandingkan dengan sektor swasta, Dinas Sosial dinilai masih kurang aktif dan kurang konsisten dalam memberikan dukungan jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan penguatan komitmen diperlukan agar pemberdayaan penyandang disabilitas dapat lebih merata dan berkelanjutan.

3.2 Faktor Kendala Strategi Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai terhadap penyandang disabilitas masih terdapat berbagai kendala. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada saat melaksanakan penelitian dilapangan di dapati beberapa faktor yang menjadi kendala Strategi Dinas Sosial Dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas. Beberapa faktor tersebut meliputi:

1. Kurangnya Kendala Internal

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya Dinas Sosial memberdayakan penyandang disabilitas. Kedua unsur ini sangat vital dalam mendukung keberhasilan program, namun belum menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap kebutuhan spesifik penyandang disabilitas serta minimnya tenaga profesional di daerah seperti Manggarai memperparah tantangan yang ada. Meski telah dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak, jumlah tenaga ahli yang terbatas membuat pembangunan inklusif belum bisa terwujud secara merata. Distribusi Bantuan Yang Belum Merata

Pada saat melaksanakan penelitian di lapangan penulis menemukan faktor penghambat lainnya yakni distribusi bantuan yang belum merata di seluruh Desa Penfui Timur, masih ada keluarga yang terdampak *stunting* yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah dalam penanganan *stunting* melalui pemanfaatan Dana Desa di Desa Penfui Timur

2. Faktor Kendala Eksternal

Lingkungan sosial memegang peran krusial dalam memberdayakan penyandang disabilitas, namun sering kali justru menjadi hambatan karena rendahnya kesadaran masyarakat, stigma negatif, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Selain itu, keterbatasan aksesibilitas di ruang publik semakin mempersempit peluang penyandang disabilitas untuk mandiri dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Kendala Dalam Memeberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Manggarai Privinsi Nusa Tenggara Timur

Upaya dalam mengatasi faktor-faktor kendala dalam memeberdayakan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Privinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis serta terstruktur dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut agar pemberdayaan penyandang disabilitas dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Faktor Internal

Upaya yang dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi kendala-kendala internal Dinas Sosial Kabupaten Manggarai yang muncul dalam menerapkan Strategi Dinas Sosial dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas. Dinas Sosial berupaya mengatasi berbagai tantangan internal dalam memberdayakan penyandang disabilitas dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efisien, serta membangun koordinasi lintas sektor. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan program yang dijalankan lebih tepat sasaran, berdampak nyata, dan mampu menjawab kebutuhan riil penyandang disabilitas di lapangan.

2. Faktor Eksternal

Upaya yang dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi kendala-kendala eksternal Dinas Sosial Kabupaten Manggarai yang muncul dalam menerapkan Strategi Dinas Sosial dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas. Dinas Sosial Kabupaten Manggarai terus berupaya mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas melalui sosialisasi dan kampanye edukatif. Upaya ini diperkuat dengan advokasi kebijakan inklusif kepada pemerintah agar tercipta regulasi yang berpihak pada hak-hak disabilitas. Meskipun menghadapi tantangan birokrasi, langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten demi menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian yang berjudul strategi dinas sosial telah banyak dilakukan sebelumnya dengan beragam fokus dan metode. Penelitian ini hadir untuk memberikan prespektif spesifik mengenai konteks memberdayakan penyandang disabilitas

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas tidak hanya sebatas pemberian alat bantu dan lain sebagainya tetapi juga harus memberikan dukungan dengan memberikan motivasi serta penguatan keterampilan sesuai dengan kemampuan dari para penyandang disabilitas tersebut secara holistik (Amansyah et al., 2023), sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhailah Hayati (2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Binjai sudah berjalan, namun belum optimal. Program pemberdayaan yang dilaksanakan berupa pelatihan keterampilan, namun masih terbatas dari segi frekuensi, jenis pelatihan, serta jangkauan peserta. Sebagian besar pelatihan hanya dilakukan setahun sekali, dan belum semua penyandang disabilitas dapat mengaksesnya. Selain itu, terdapat kendala dalam pendataan dan minimnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas ke layanan publik dan pelatihan kerja. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Dinas Sosial telah berupaya melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Binjai, upaya tersebut perlu ditingkatkan baik dari sisi cakupan program, kualitas pelatihan, keterlibatan pihak luar, hingga akses yang setara terhadap seluruh fasilitas sosial. Pendekatan pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas dan partisipasi aktif menjadi kunci untuk menciptakan kemandirian sosial bagi penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan bantuan alat bantu saja melainkan juga harus mendapatkan polapembinaan yang sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki (Ulfa et al., 2020). Terdapat penelitian yang sama yakni pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dalam meningkatkan keterlampiran dari para penyandang disabilitas, seperti penelitian yang dilakukan oleh Leander Alvian Dwivan (Alvian Dwivan, 2021)

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian (Ulfa et al., 2020) yang berfokus pada pola pembinaan penyandang disabilitas daksa saja sedangkan, penelitian ini berfokus pada sejauh mana strategi dari dinas sosial dalam memberdayakan para penyandang disabilitas secara keseluruhan

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh (Alvian Dwivan, 2021) Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif, Membahas mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas, Penelitian ini ingin mengetahui peran peran dinas sosial sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah bagaimana bagaimana strategi yang dilakukan oleh dinas sosial dalam memberdayakan para penyandang disabilitas dengan lokasi khusus di kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.

IV. KESIMPULAN

Strategi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah dirancang dengan baik, terutama pada tahap perumusan strategi. Visi dan misi telah ditetapkan, serta analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman telah dilakukan secara menyeluruh. Namun, implementasi dan evaluasi strategi masih belum berjalan secara optimal.

Kendala yang dihadapi bersumber dari faktor internal dan eksternal. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan lintas sektor menyebabkan Dinas Sosial belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan penyandang disabilitas, seperti bantuan alat bantu, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara bersamaan.

Meskipun Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang ada, langkah-langkah yang diambil masih terbatas pada peningkatan kualitas sumber daya yang tersedia. Kurangnya peningkatan kuantitas sumber daya menyebabkan proses pemberdayaan belum terlaksana secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Ruang lingkupnya masih terbatas pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, padahal pemberdayaan penyandang disabilitas juga melibatkan instansi dan pihak lain yang belum dijangkau dalam kajian ini. Selain itu, proses pengumpulan data bergantung pada ketersediaan informan dan waktu yang terbatas, sehingga tidak semua informasi dapat digali secara mendalam, terutama dari kalangan penyandang disabilitas yang memerlukan pendekatan khusus. Dari segi metodologi, pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada pemaparan strategi tanpa mengevaluasi secara menyeluruh dampak nyata dari strategi tersebut. Wilayah penelitian yang terbatas pada satu kabupaten juga membuat hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi ke daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Keterbatasan-keterbatasan ini menjadi catatan penting untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan studi yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, LSM, dan organisasi penyandang disabilitas, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan lintas sektor. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan pendekatan partisipatif serta metode campuran (*mixed methods*) agar mampu menggambarkan secara kualitatif dan mengukur secara kuantitatif efektivitas strategi pemberdayaan. Selain itu, studi komparatif antar wilayah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik di daerah lain, serta kajian terhadap regulasi dan kebijakan lokal yang mendukung atau menghambat upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, sehingga dapat memperkuat dasar implementasi strategi ke depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama penulis tujuan kepada organisasi perangkat daerah dalam hal ini seluruh perangkat Dinas Sosial yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Ucapan terimakasih yang tulus penulis juga sampaikan kepada dosen pembimbing. Samsul Arifin, S.pd, MM, atas segenap bimbingan dan arahnya selama pelaksanaan penelitian ini.

Terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bersedia menjadi narasumber, baik dari Sosial kabupaten Manggarai, serta para penyandang disabilitas atas waktu, informasi, dan wawasan berharga yang telah dibagikan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alvian Dwivan, L. (2021). *PERAN DINAS SOSIAL DALAM MEMBERDAYAKAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAGELANG* [UniversitasTidar]. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10042
- Amansyah, D., Nanda, I. Y., & Syahid, I. (2023). Peranan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 7–20. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.51>
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Pertama). PT RINEKA CIPTA.

- Bunga, B. N., Laure, S. H. A. I., & Kiling, I. Y. (2022). Religiosity and Disability in West Timor: Pray, Access and Peer Empowerment. *Journal of Disability & Religion*, 26(1), 61–69. <https://doi.org/10.1080/23312521.2021.1906824>
- David, F. R. (2017). *Strategic Management: Concepts and Cases* (16th edition). Pearson Education. www.pearsoned.com/permissions/.
- Dunan, A., Mudjiyanto, B., Karman, & Walujo, D. (2025). Unveiling Disability Empowerment: Evaluating ICT Skill Enhancement Initiatives in Indonesia. *Media and Communication*, 13. <https://doi.org/10.17645/mac.9078>
- Hastuti, L. T., Harahap, B., Rianto, A., & Sulistyarningsih, N. (2022). Peran Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(2), 147–161. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v7i2.5570>
- Hayati, S. (2019). *PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BINJAI* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8373>
- INDRIANI, A. (2023). *Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/73665>
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (7th ed.). Rajawali Pers.
- Mulyono, S. E., Putra Widhanarto, G., Sutarto, J., Malik, A., & Shofwan, I. (2023). Empowerment strategy for people with disabilities through nonformal batik education program. *Cakrawala Pendidikan*, 42(3), 683–694. <https://doi.org/10.21831/cp.v42i3.59191>
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia. <https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/376/2/ISI%20BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20SOSIAL.pdf>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif* (Edisi Kedua). CV. ALfabeta.
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta.
- Ulfa, R. M., Jauhari, T., & Bahiroh, S. (2020). Pola Pembinaan Kepercayaan Diri Penyandang Disabilitas Daksa Bina. *Bina'Al-Ummah*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/bu.v15i1.6551>
- Wahyudi, F. E., Rahman, A. Z., Widiartanto, Paramasatya, S., Wanto, A., & Sugianto, A. (2023). Measuring the social return on investment of empowerment of persons with disabilities (Case study: The role of the corporate social responsibility (CSR) program of PT Pertamina fuel terminal (FT) Boyolali located in Tawang Sari village, Boyolali Regency, in developing independence for people with disabilities). *AIP Conference Proceedings*, 2722(1), 060002. <https://doi.org/10.1063/5.0142943>